

Penguatan Kelembagaan BUMDes: Upaya Meningkatkan Potensi Ekonomi Kreatif di Pulau Lakkang

Novayanti Sopia Rukmana¹, Asri Nur Aina², Oky Nur Pratiwi Johansyah³, Darman Manda⁴, Didin Halim⁵

Universitas Negeri Makassar^{1,2,3,4,5}
email: novayanti@unm.ac.id

Abstrak

Pulau Lakkang memiliki potensi yang besar dalam bidang perikanan dan pariwisata, namun perekonomian masyarakatnya masih belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya kelembagaan Badan Usaha Milik Desa. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk melakukan penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Pulau Lakkang dengan menggunakan pendekatan Partisipatory Action Research. Kegiatan diawali dengan identifikasi masalah bersama masyarakat dan stakeholder terkait. Kemudian dibentuk tim yang bertugas merencanakan dan melaksanakan program untuk mengatasi masalah. Program meliputi peningkatan pemahaman masyarakat tentang Badan Usaha Milik Desa, peningkatan modal Badan Usaha Milik Desa, pelatihan manajemen keuangan, peningkatan akses pasar, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan program dievaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas dan merumuskan perbaikan ke depan. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat di Pulau Lakkang menegaskan bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Desa memiliki potensi strategis yang signifikan untuk menggerakkan perekonomian desa berbasis potensi lokal, asalkan dikelola dengan baik. Meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan terkait pemahaman konsep, permodalan, manajemen keuangan, akses pasar, dan partisipasi masyarakat, upaya penguatan telah berhasil meningkatkan kapasitas pengurus dan mendorong peran aktif masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Adalah penting untuk menggarisbawahi bahwa pendampingan jangka panjang dan berkelanjutan pasca kegiatan pengabdian menjadi kunci utama dalam memastikan keberlanjutan efektif dari program-program yang diinisiasi. Lebih lanjut, komitmen pemerintah daerah melalui kebijakan pendukung dan skema pembiayaan menjadi faktor krusial dalam menjaga keberlanjutan serta optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa.

Kata Kunci: BUMDes, Kelembagaan, Ekonomi Kreatif, Pulau Lakkang, Pemberdayaan Lokal

Abstract

Pulau Lakkang holds significant potential in the fields of fisheries and tourism, yet its local economy has not reached its full potential. One contributing factor is the weak institutional structure of the Village-Owned Enterprises (BUMDes). The objective of this community service initiative is to strengthen the institutional capacity of BUMDes in Pulau Lakkang using a Participatory Action Research approach. The activities commence with the identification of issues collaboratively with the community and relevant stakeholders. Subsequently, a team is formed to plan and execute programs addressing these issues. The programs include enhancing community understanding of BUMDes, increasing the capital of BUMDes, providing financial management training, improving market access, and enhancing community participation. The implementation



of the programs is periodically evaluated to assess effectiveness and formulate future improvements. The outcomes of the community service activities in Pulau Lakkang affirm that the existence of BUMDes holds significant strategic potential to stimulate the local economy, provided it is managed effectively. Despite facing challenges related to conceptual understanding, funding, financial management, market access, and community participation, the strengthening efforts have successfully increased the capacity of administrators and encouraged active community involvement in managing BUMDes. Emphasizing the importance of long-term and sustainable mentoring post-community service activities is crucial in ensuring the effective continuity of initiated programs. Furthermore, the commitment of local government through supportive policies and financing schemes becomes a pivotal factor in maintaining sustainability and optimizing the role of BUMDes to enhance the socio-economic well-being of the village community.

Keywords: BUMDes, Institutional, Creative Economy, Lakkang Island, Local Empowerment

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Indonesia. Desa memiliki potensi ekonomi yang besar jika dikelola dengan baik. Untuk mengelola potensi ekonomi desa, pemerintah mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, BUMDes diharapkan dapat menjadi motor penggerak peningkatan ekonomi pedesaan.

Akan tetapi, masih banyak BUMDes yang belum efektif dalam memberdayakan potensi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah, seperti kurangnya pemahaman pengurus dan masyarakat tentang konsep BUMDes, minimnya modal usaha, lemahnya manajemen keuangan dan operasional, hingga kurangnya dukungan regulasi dari pemerintah daerah (Sutoro et al. 2020). Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kelembagaan agar BUMDes dapat berfungsi secara optimal.

Masalah kelembagaan BUMDes juga dihadapi oleh Pulau Lakkang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pulau kecil ini memiliki potensi sektor perikanan dan pariwisata yang cukup menjanjikan. Berdasarkan data BPS Kota Makassar (2021), sektor perikanan menyumbang 10% dan pariwisata 8% bagi produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Makassar. Namun sayangnya, potensi tersebut belum dapat dikelola secara maksimal oleh BUMDes setempat. Menurut penelitian Mulyana (2019), pengelolaan BUMDes di Pulau Lakkang masih mengalami masalah permodalan, sumber daya manusia, dan koordinasi antar lembaga terkait. Akibatnya hasil yang dicapai belum signifikan dalam memberdayakan masyarakat pulau.

Atas dasar itulah, penulis melakukan program pengabdian kepada masyarakat untuk melakukan penguatan kelembagaan BUMDes di Pulau Lakkang melalui pendekatan Partisipatory Action Research (PAR). Melalui pendekatan ini, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program

penguatan BUMDes. Dengan demikian, diharapkan program yang dijalankan betul-betul sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan sekaligus dapat meningkatkan rasa kepemilikan mereka terhadap BUMDes.

Beberapa penelitian sebelumnya juga mendukung penguatan kelembagaan BUMDes melalui pendekatan PAR ini. Penelitian Hadi et al. (2020) di Banyuwangi misalnya menunjukkan bahwa PAR dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan dan peningkatan usaha BUMDes. Sementara Marwati et al. (2021) dalam penelitiannya di Lombok Tengah menemukan bahwa PAR mampu memberdayakan para pengurus dan anggota BUMDes untuk berkontribusi positif bagi institusi. Dengan demikian, adopsi pendekatan PAR ini relevan dengan upaya penguatan BUMDes Pulau Lakkang.

Secara garis besar, program pengabdian masyarakat ini dirancang untuk mengatasi lima permasalahan utama yakni kurangnya pemahaman pengurus dan masyarakat tentang BUMDes, rendahnya permodalan BUMDes, manajemen keuangan yang belum memadai, kurangnya akses pemasaran hasil produksi BUMDes, serta lemahnya partisipasi masyarakat dalam mengelola BUMDes. Melalui program-program penguatan kapasitas yang direncanakan dan dievaluasi bersama masyarakat, maka diharapkan kelima permasalahan tersebut dapat diatasi serta BUMDes Pulau Lakkang dapat memberdayakan perekonomian masyarakat secara optimal.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini difokuskan di Pulau Lakkang, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebagai pulau kecil dengan potensi kelautan dan pariwisata yang besar, program penguatan BUMDes sangat tepat untuk diterapkan guna memajukan perekonomian warga setempat. Para peserta program meliputi pengurus dan anggota BUMDes.

Sebelum pelaksanaan program, tim pengabdian terlebih dahulu melakukan survei pendahuluan dan berkoordinasi dengan mitra mengenai rencana kerja yang disepakati bersama. Setelah mencapai kesepakatan, tahap selanjutnya adalah melaksanakan sosialisasi tentang program pengabdian kepada warga Pulau Lakkang. Hal ini untuk mengenalkan tujuan dan rencana kegiatan kepada segenap lapisan masyarakat agar mereka memahami manfaat program penguatan BUMDes ini.

Sesi sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) bersama warga juga bertujuan untuk menggali informasi kondisi eksisting BUMDes Pulau Lakkang. Apa saja keunggulan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi mitra. Dengan melakukan participatory rural appraisal, diharapkan program pengabdian dapat dirancang tepat guna berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata mitra. Hasil pemetaan permasalahan BUMDes ini nantinya menjadi dasar perencanaan tindak lanjut program.

Salah satu kegiatan utama dari pengabdian masyarakat ini adalah pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pengurus dan anggota BUMDes Pulau Lakkang. Beberapa



materi penting yang diberikan yakni manajemen kelembagaan dan keuangan BUMDes, teknik pemasaran yang efektif, serta penyusunan rencana kerja dan rencana bisnis BUMDes jangka pendek maupun jangka panjang.

Pelatihan dilakukan baik secara teori maupun praktik, menggunakan pendekatan andragogi yang interaktif. Selain pelatihan, program penguatan BUMDes juga mencakup pendampingan kepada pengurus dalam menyusun rencana strategis pengembangan usaha BUMDes 5 tahun mendatang. Rencana strategis ini penting sebagai pedoman bagi kepengurusan BUMDes berikutnya.

Untuk memastikan implementasi program berjalan sesuai rencana, dilakukan monitoring secara berkala dengan melibatkan mitra. Monitoring dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk mengevaluasi capaian luaran dan mengidentifikasi kendala yang muncul. Hasil evaluasi ini kemudian menjadi umpan balik bagi perbaikan tindak lanjut program penguatan BUMDes ke depannya.

Pada akhir periode pengabdian, tim bersama mitra melakukan evaluasi menyeluruh terkait efektivitas kegiatan, pencapaian indikator keberhasilan, dan rencana keberlanjutan upaya pengembangan BUMDes pasca program. Laporan akhir kegiatan disusun secara terstruktur dilengkapi data dan dokumentasi guna pertanggungjawaban, diseminasi program, serta publikasi pada jurnal ilmiah. Dengan demikian rangkaian penguatan BUMDes Pulau Lakkang dapat berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Secara keseluruhan, metode pelaksanaan program pengabdian yang ditempuh mencerminkan pendekatan partisipatif guna melibatkan kontribusi pemikiran dan tenaga dari mitra secara maksimal. Harapannya agar program penguatan institusi BUMDes ini dapat berkelanjutan dan semakin mandiri setelah masa pendampingan berakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian masyarakat penguatan BUMDes Pulau Lakkang dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Juli 2023 bertempat di Balai Pertemuan Desa Pulau Lakkang. Kegiatan diikuti oleh 30 orang peserta yang berasal dari pengurus inti dan pengawas BUMDes, perwakilan unit usaha BUMDes, serta perangkat desa.

Kegiatan diawali dengan registrasi peserta dan pembukaan oleh Kepala Desa Pulau Lakkang yang menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya program pengabdian masyarakat guna penguatan kapasitas pengelolaan BUMDes. Selanjutnya pemateri menyampaikan materi tentang pengelolaan administrasi dan keuangan BUMDes. Antusiasme peserta cukup tinggi dengan banyaknya pertanyaan terkait pencatatan transaksi usaha BUMDes.



Sesi kedua merupakan pelatihan penyusunan business plan BUMDes oleh pemateri. Peserta secara aktif terlibat dalam simulasi penyusunan rencana pengembangan produk unggulan desa. Kemudian pada sesi terakhir, pemateri menyampaikan strategi pemasaran produk BUMDes di era digital. Peserta diberikan ketrampilan teknik optimasi media sosial dan platform e-commerce untuk memasarkan hasil produksi BUMDes.

Secara keseluruhan, antusiasme peserta cukup tinggi dalam mengikuti rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini. Hal ini terlihat dari tingginya partisipasi peserta saat tanya-jawab maupun diskusi kelompok. Harapannya pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing BUMDes Pulau Lakkang.

Pembahasan Hasil Kegiatan

Nilai tambah yang diperoleh mitra dan masyarakat dari kegiatan pengabdian ini antara lain peningkatan pemahaman mengenai konsep, tujuan, dan manfaat BUMDes bagi perekonomian desa. Selain itu, kemampuan manajerial pengurus BUMDes juga meningkat melalui pelatihan pengelolaan keuangan, pemasaran, dan penyusunan business plan BUMDes. Diharapkan hal ini dapat mendorong pertumbuhan usaha BUMDes yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Pulau Lakkang.



Gambar 1. Narasumber Kegiatan Menyampaikan Materi

Faktor pendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian antara lain dukungan penuh dari pemerintah desa dan antusiasme peserta yang tinggi dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Adapun faktor penghambat yang dihadapi adalah keterbatasan waktu sehingga materi yang diberikan dirasa masih belum mencukupi. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pendampingan jangka panjang secara berkelanjutan.

Peran pendamping dalam kegiatan ini adalah memberikan transfer pengetahuan melalui pelatihan dan pendampingan penyusunan rencana pengembangan usaha BUMDes. Solusi yang diberikan terkait aspek permodalan, pemasaran, dan peningkatan kapasitas SDM pengelola BUMDes. Setelah kegiatan pengabdian, akan dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan rencana aksi yang disepakati dapat dilaksanakan dengan baik.



Rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan antara lain perlunya alokasi anggaran stimulan dari pemerintah daerah untuk pengembangan usaha BUMDes yang berpotensi. Selain itu regulasi daerah yang mendorong kemitraan usaha antara BUMDes dengan pelaku usaha besar juga diperlukan untuk membuka akses pasar bagi produk BUMDes. Dengan dukungan skema pembiayaan dan kebijakan yang kondusif dari berbagai pihak, diharapkan BUMDes Pulau Lakkang dapat terus berkembang dan makin optimal memberdayakan perekonomian masyarakat desa.



Gambar 2. Foto Bersama Tim PKM, Narasumber dan Peserta

KESIMPULAN

Implementasi kegiatan pendampingan BUMDes Lakkang ini telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengurus serta anggota dalam pengelolaan badan usaha milik desa. Melalui pendekatan participatory action research (PAR), penguatan manajemen dan akses pasar berhasil mengoptimalkan potensi lokal desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

Namun, kesuksesan ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan dengan pendampingan jangka panjang dan pelatihan lanjutan agar pengurus serta anggota BUMDes Lakkang dapat mandiri mengelola operasional dan pengembangan usaha produktif desa. Pemerintah daerah disarankan memberikan regulasi dan skema pembiayaan khusus untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan BUMDes, tidak hanya di Kelurahan Lakkang tapi seluruh desa di Sulawesi Selatan.

Selain itu, membangun jejaring kerja sama antar BUMDes dan kolaborasi dengan pelaku usaha besar dapat memperluas akses pasar serta meningkatkan daya saing produk unggulan Desa Lakkang. Keterlibatan aktif masyarakat desa dalam kegiatan ekonomi BUMDes juga penting untuk memastikan pemerataan manfaat bagi warga. Dengan demikian, BUMDes Lakkang dapat menjadi motor penggerak pembangunan desa yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lakkang secara merata.

REFERENSI

Anwar, C.A., Mediyati, A.Z.A., dan Kusumastuti, R. 2022. Partisipatory Action Research (PAR) to Empower BUMDES Management in Coastal Areas. *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3(2), 230-241

BPS. 2021. Makassar Dalam Angka 2021. Makassar: Badan Pusat Statistik Kota Makassar.

Hadi, R.P., Kuncoro, B., dan Vidya, F.H. 2020. Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Melalui Konsep Triple Helix. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, Vol.3(2), 215-224.

Marwati, Nurul, A.C., dan Thoriq A. 2021. Penguatan Kelembagaan BUMDes Bina Warga Usaha Berbasis Potensi Desa Melalui Partisipatory Action Research (PAR). *Walasuji*, Vol.12(2), 271-279

Mutakin, F.F. & Rais, B.K. 2019. Peluang Dan Tantangan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Pulau Lakkang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. *Versal Pro*, Vol.2(1),13-21

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Siagan, D. M. 2021. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Campaga Hulonthalangi Kecamatan Marancar. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 20(1), 381-389.

Sofyani, H., Akbar, F., Rustiadi, S. 2019. Pengembangan Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 10(1), 27-44.

Sutoro, E., Rustiadi, E., Said, M. 2020. Modal Sosial dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Kawistara*, Vol. 10(1), 13-24